



# Hasil Studi: Pendidikan Non-Formal sebagai Jalur Alternatif Pembelajaran untuk Anak Tidak Sekolah

Kerjasama PSKP Kemendikbudristek dengan UNICEF

# Kisah Halisya

Halisyah (17 tahun), menunjukkan keterampilan *pastry* yang ia dapatkan dari pembelajaran vokasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nadya di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

**Halisyah pernah putus sekolah** setelah ikut pindah bersama orang tuanya yang bekerja sebagai TKI/PMI di luar negeri. Kini, ia melanjutkan studinya di pendidikan non-formal.





**Tidak semua anak bernasib  
baik seperti Halisya**

**4,1 Juta**

**Anak dan remaja di  
Indonesia tidak bersekolah**

Setara dengan **7,56%** dari populasi  
anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) di  
Indonesia.

# Pendidikan Non-Formal (Kesetaraan) sebagai **jalur pembelajaran alternatif bagi Anak Tidak Sekolah**



Menawarkan berbagai jenis layanan



Modalitas pembelajaran yang fleksibel

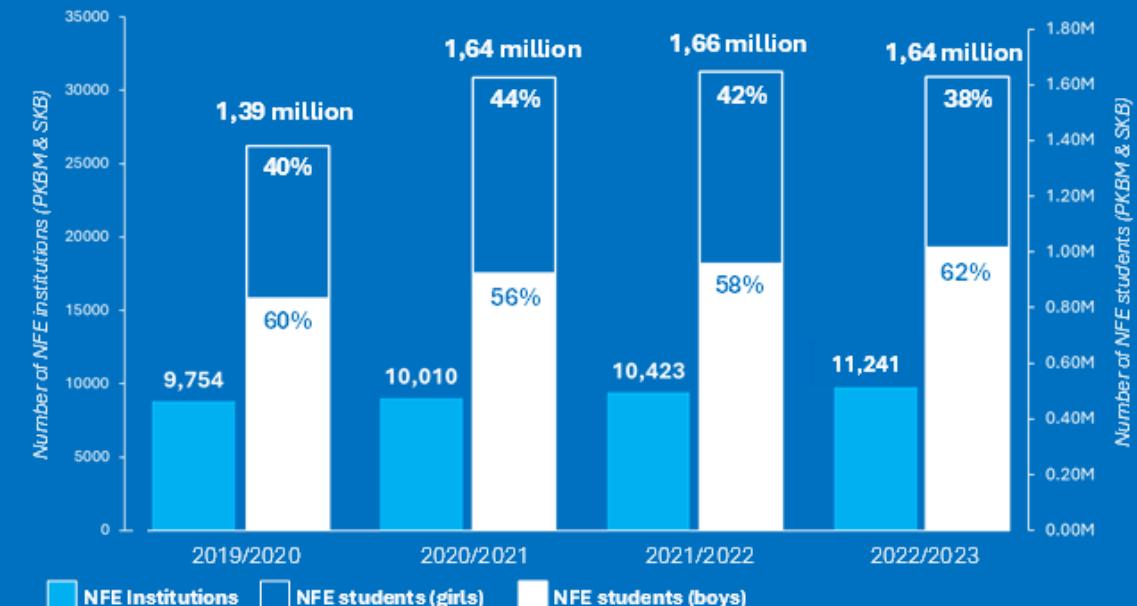


Memberikan sertifikat kesetaraan

## Statistik PNF – Kesetaraan 2019-2022

Terdapat sekitar **11 ribu lembaga** dan **1,6 juta warga belajar** Pendidikan Non-Formal di Indonesia

Terdapat peningkatan pada jumlah lembaga dan siswa PNF dari 2019 hingga 2022, terutama selama tahun pertama pandemi COVID-19.



# Peran Pendidikan Non-Formal sebagai Jalur Pembelajaran Alternatif bagi Anak Tidak Sekolah

Pendidikan non-formal memainkan peran kunci dalam penyediaan layanan pendidikan bagi ATS

Banyak ATS yang bekerja atau memiliki komitmen lain yang tidak memungkinkan mereka melanjutkan pembelajaran selama jam sekolah formal.

Sebagian besar ATS memiliki usia yang jauh lebih tinggi dibandingkan siswa yang duduk di jenjang pendidikan yang sama sehingga banyak ATS memilih kembali belajar melalui jalur non-formal.

- • • •
- • • •
- • • •



# Tujuan Studi

1

**Mereviu implementasi layanan pendidikan non-formal** untuk mengidentifikasi efektivitasnya dalam menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang ATS yang berbeda-beda

2

Mengidentifikasi apakah layanan pendidikan non-formal dapat **memberikan layanan pendidikan yang mudah diakses, inklusif, berkualitas dan relevan kepada ATS** yang kembali bersekolah melalui sistem pendidikan ini.

3

Mengidentifikasi **tantangan yang dihadapi** layanan pendidikan non-formal serta elemen kunci dalam pemberian layanan yang dapat diperkuat.

4

Mengidentifikasi **peluang dan praktik-praktik baik** dalam layanan pendidikan non-formal, termasuk yang dapat menghubungkan pendidikan non-formal dengan sistem pendidikan formal paska sekolah menengah, misalnya program TVET.

5

Mengidentifikasi **rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang** untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan non-formal untuk memenuhi beragam kebutuhan ATS.

# 8 Area Penelitian



Tata Kelola &  
Manajemen



Monitoring &  
Supervisi



Sumber Daya  
Manusia



Kurikulum &  
Pembelajaran



Koordinasi &  
Kemitraan



Gender &  
Inklusi



Persepsi terkait  
Layanan PNF



Dampak  
COVID-19

# Cakupan Studi & Metodologi



Pengumpulan data dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, desa dan 20 lembaga PNF di

## Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Bone.



### Metodologi:



*Literature Review*  
Tinjauan Pustaka



*Focus Group Discussion*  
Diskusi Kelompok Terpimpin



*In-Depth Interview*  
Wawancara Mendalam

### Sampel:

#### Tingkat Nasional

Wawancara 8 orang

#### Tingkat Provinsi

Wawancara 6 orang

#### Tingkat Kabupaten

Wawancara 20 orang

#### Tingkat Desa

Wawancara 21 kepala desa

#### Tingkat Sekolah

22 manajemen & 115 tutor

78 warga belajar

49 orangtua warga belajar

11 ATS

11 orangtua ATS

# Temuan Studi



# Tata Kelola dan Manajemen

## Tata Kelola

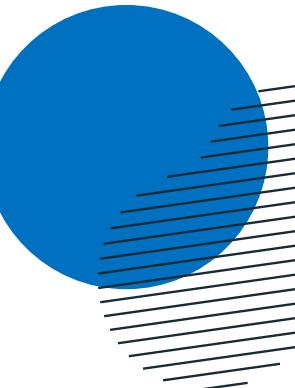
Tata kelola PNF di tingkat nasional cukup kompleks dan melibatkan sejumlah kementerian (Kemendikbudristek, Kemenag, Kemdagri, Kemendesa, Kemnaker, Kemenkeu) yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda dalam operasional PNF.



## Manajemen

- Operasional lembaga PNF bergantung sepenuhnya pada dana BOP Kesetaraan. Namun, sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya memenuhi biaya operasional yang diperlukan sehingga mayoritas lembaga PNF terus-menerus mengalami defisit.
- Anggaran desa dapat menjadi sumber pendanaan alternatif. Namun demikian, lembaga PNF dan ATS belum menjadi prioritas pendanaan oleh pemerintah desa.

• • •  
• • •  
• • •  
• • •





# Monitoring & Supervisi

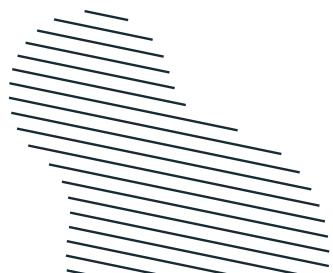


Sebagian besar lembaga PNF belum memenuhi 8 standar nasional pendidikan kecuali standar kompetensi lulusan.

65 persen Lembaga PNF belum terakreditasi



Pemangku kepentingan di lembaga PNF mengakui kurangnya kejelasan mengenai proses akreditasi, standar yang harus mereka penuhi, serta isi kerangka kurikulum yang perlu diadopsi.



Dinas Pendidikan di kabupaten/kota diberikan mandat untuk melakukan monitoring dan supervisi terhadap lembaga PNF, namun kapasitasnya seringkali terbatas karena kurangnya jumlah staf, yang disebabkan oleh lambatnya proses penggantian staf yang pensiun.





# Sumber Daya Manusia

Hanya  
**41%**



Tutor menerima paling tidak satu pelatihan dalam 5 tahun terakhir.

**79%**



Tutor memiliki gelar S1 dan 2% memiliki gelar master. Namun tidak semua relevan dengan kebutuhan pembelajaran.

Lembaga PNF tidak dapat menarik atau mempertahankan tutor pengajar yang berkualitas karena terbatasnya kemampuan finansial.



Sebagian besar tutor memiliki kontrak jangka pendek, atau bekerja secara sukarela, atau menjadikannya sebagai pekerjaan tambahan

**55%**

tutor berpenghasilan antara 8 hingga 17 kali lebih sedikit dari upah minimum daerah.

55% tutor mendapatkan Rp 125.000 - 250.000/bulan

23% tutor mendapatkan Rp 300.000 - 500.000/bulan

17% tutor mendapatkan Rp 800.000/bulan

5% tutor mendapatkan Rp 1 juta/bulan

# Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum PNF selaras dengan kurikulum pendidikan formal. Perbedaan utamanya terletak pada mekanisme penyampaian dan durasi pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan pembelajaran digital dan sebagian besar siswa PKBM tidak memiliki masalah dengan akses ke ponsel android karena mereka sedang bekerja.

Adopsi Kurikulum Merdeka, pembelajaran yang fleksibel, dan pendekatan berbasis kompetensi telah membuka banyak peluang bagi lembaga PNF untuk berfokus pada materi kurikulum yang esensial dan kompetensi-kompetensi dasar, yang juga meliputi keterampilan abad ke-21.

Beberapa lembaga PNF berfokus pada keterampilan akademik dan tidak banyak mengajarkan keterampilan hidup karena sumber daya yang terbatas. Warga belajar di layanan PNF bervariasi dari anak-anak hingga orang dewasa, dan hal ini menimbulkan tantangan baik dalam hal gaya belajar maupun kebutuhan belajar (keterampilan vokasi versus numerasi/literasi dasar).

Pembelajaran vokasi secara resmi hanya 30% dari Kurikulum PNF, namun permintaan terkait topik ini tinggi terutama di kalangan siswa yang lebih tua. Pelaksanaannya seringkali mengandalkan kesukarelaan dan kompetensi pengajar.



# Koordinasi dan Kemitraan

- Kemitraan lintas sektoral dalam sektor PNF bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran, diantaranya melalui pemberian keterampilan yang relevan pada siswa sesuai pekerjaan yang tersedia, membantu penempatan lulusan PNF ke dalam pekerjaan, dan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan ekonomi daerah sekitarnya.
- Pada tingkat pusat, terdapat koordinasi dan kemitraan antar kementerian dalam pengembangan kurikulum PNF dan pengelolaan anggaran untuk program PNF.
- Di daerah koordinasi dan kerjasama diantaranya diantaranya dilakukan melalui perluasan program pemerintah dan lembaga PNF dalam penanganan ATS, melalui program khusus yang mendorong ATS untuk dapat kembali ke layanan pendidikan melalui lembaga PNF.
- Kemitraan di tingkat desa antara pemerintah desa dan lembaga PNF merupakan fenomena yang jarang ditemukan meskipun ada contoh kemitraan yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa.
- Pengelola PNF dan kepala desa berperan penting dalam mendorong kemitraan yang sukses, yang dapat mengarah pada penguatan kualitas layanan PNF.



# Gender dan Inklusi

- Lembaga PNF memiliki tingkat partisipasi warga belajar laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Namun demikian, partisipasi perempuan pada lembaga PNF mungkin perlu dieksplorasi lebih jauh dengan melihat sejumlah isu terkait norma budaya (misal: pernikahan usia anak pada anak perempuan) yang dapat menjadi faktor penghambat partisipasi pendidikan mereka.
- Lembaga PNF mengakui bahwa mereka tidak memiliki fasilitas atau tenaga pendidik yang memiliki kapasitas untuk menerima murid penyandang disabilitas. Namun demikian, untuk menghindari stigma masyarakat, sejumlah orang tua lebih memilih mendaftarkan anak penyandang disabilitas mereka ke lembaga PNF daripada Sekolah Luar Biasa (SLB).
- Beberapa orang tua lain percaya bahwa anak-anak mereka tidak dapat mengikuti proses belajar dengan baik di sekolah dengan sistem belajar tatap muka setiap hari, dan lembaga PNF memberikan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak penyandang disabilitas.
- Data nasional menunjukkan bahwa ada sejumlah kecil lembaga PNF yang dapat melayani murid penyandang disabilitas - sekitar 6% dari 11.199 lembaga PNF.





# Persepsi terkait Layanan PNF

Persepsi terkait layanan PNF sangat bervariasi, bergantung pada pihak yang diwawancara.



## Masyarakat Umum

Persepsi tentang PNF di kalangan masyarakat tampaknya bergantung pada kepala desa dan efektivitas PNF dalam memenuhi kebutuhan desa untuk memberikan kesempatan belajar bagi ATS, atau seberapa efektif PNF dalam memenuhi kebutuhan anak atas pelatihan lebih lanjut agar lebih mudah memperoleh pekerjaan.



## Orang Tua

Kebanyakan orang tua memiliki persepsi positif terhadap PNF. Pengetahuan mereka tentang PNF terbangun karena sosialisasi yang intens oleh kepala desa. Mereka menilai PNF memberikan fleksibilitas belajar bagi anak-anak mereka dan membantu anak-anak mereka untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan bagi keluarga.



## Kepala Desa

"Jika Anda memiliki masalah dengan belajar manajemen waktu, atau Anda sudah lebih tua, dan Anda menghadapi kendala keuangan, tetapi Anda membutuhkan ijazah, maka PNF adalah solusi untuk Anda."



## Manajemen PNF

"industri lebih memilih lulusan PNF karena sudah dibekali dengan keterampilan khusus kebutuhan industri." Lebih lanjut, "Warga belajar memilih belajar di PNF karena waktu dan metode pembelajaran yang fleksibel ini, oleh karena itu mereka terus bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan belajar untuk pendidikan."



# Dampak COVID-19

Dampak pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar siswa di lembaga PNF tidak dapat diukur secara mendalam karena hal ini memerlukan penilaian sebelum, selama, dan setelah pandemi berlangsung. Namun, muncul persepsi yang menilai dampak pandemi COVID-19 pada warga belajar lembaga PNF tidak terlalu signifikan.

Sebagian pembelajaran yang tetap berjalan selama masa pandemi disampaikan melalui WhatsApp, google meet, atau seTARA Daring

Tidak ada data yang memadai terkait berapa banyak yang mengakses dan apakah hasil belajar mereka tetap stabil dengan cara belajar tersebut.

Secara keseluruhan, tidak ada kejelasan bagaimana warga belajar terutama di desa-desa terpencil, yang kemungkinan besar tidak memiliki akses digital, melanjutkan studi mereka.

Selama pandemi, dalam beberapa kasus, tutor mengunjungi rumah siswa



# Rekomendasi

- Melakukan penelitian mendalam terkait Gender, Kesetaraan, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) dalam konteks PNF, termasuk jalur-jalur pembelajaran potential lainnya bagi ATS, dan menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat kebijakan dan perencanaan.
- Memperjelas dan menyepakati strategi untuk setiap kelompok target PNF, menilai kesesuaian rentang target warga belajar, dan menggunakannya sebagai dasar untuk pengembangan Rencana Strategis PNF.
- Memperkuat sistem monitoring dan akreditasi untuk meningkatkan standar dan ketersediaan data terkait kualitas PNF
- Mengembangkan rencana strategis PNF dan menggunakan dokumen ini sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas staf dan relevansi kurikulum PNF.



# Rekomendasi

- Mempromosikan profesionalisme manajemen kelembagaan PNF melalui platform jejaring professional.
- Meningkatkan pendanaan Lembaga-Lembaga PNF dengan menjadikan PNF sebagai salah satu elemen utama dalam upaya pengurangan ATS yang berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan.
- Memperkuat kualitas PNF secara menyeluruh, antara lain, dengan menyelaraskan kurikulumnya dengan kebutuhan peserta didik dan dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan persepsi publik tentang PNF.
- Di masa depan, sistem pendidikan perlu lebih siap untuk menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Dalam konteks PNF, perlu dipastikan bahwa kurikulum darurat adalah bagian dari perencanaan sektor PNF yang mencakup upaya-upaya untuk memfasilitasi pembelajaran digital dan jarak jauh.

# Terima Kasih

